

**PERBANDINGAN KINERJA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI
KABUPATEN ACEH BARAT DENGAN KABUPATEN PEMEKARANNYA
TAHUN 2011-2019**

***COMPARISON OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PERFORMANCE
BETWEEN ACEH BARAT REGENCY AND IT'S EXTENDED REGENCIES
PERIOD 2011-2019***

Reza Septian Pradana¹

¹Fungsional Statistisi Ahli BPS Kabupaten Aceh Jaya
Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km 152, Keutapang, Calang, Aceh Jaya
e-mail: reza.sp@bps.go.id

ABSTRAK

Pemekaran daerah merupakan suatu kebijakan desentralisasi yang memiliki filosofi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang bersangkutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak daerah pemekaran yang gagal dalam mengoptimalkan potensinya dan bermuara pada ketertinggalan/perlambatan pertumbuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kondisi kinerja pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten pemekaran terhadap kabupaten induknya pasca pemekaran daerah. Kinerja pembangunan sosial diukur dengan angka kemiskinan, angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia sedangkan kinerja pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Studi kasus dilakukan pada tiga kabupaten pemekaran, yaitu Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue serta kabupaten induk, yaitu Aceh Barat. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (uji-t) dengan periode data 2011-2019. Secara statistik, perbedaan kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dibandingkan kabupaten pemekarannya tidak signifikan. Ditinjau dari kinerja pembangunan sosial, Kabupaten Aceh Jaya secara signifikan sudah lebih baik dibandingkan kabupaten induk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kabupaten Nagan Raya secara signifikan sudah lebih baik dibandingkan kabupaten induk dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sederhana bagi pemerintah daerah setempat dalam memutuskan kebijakan untuk pemekaran daerah selanjutnya.

Kata kunci: pemekaran daerah, kinerja pembangunan ekonomi, kinerja pembangunan sosial, uji-t

ABSTRACT

Regional extension is one of decentralization policy that philosophically formed to help a region on improving its welfare of society through improving economic, social, and government performance. However, while implementing this kind of policy, many extended

regions failed to optimize its potencies and ended up having slow-moving growth. This study aimed at estimating and analyzing the comparison between extended region dan main region on optimizing its economic and social performance. Social development performance is measured by using number of poverty, life expectancy at birth, mean years of schooling and human development index while economic development performance is measured by using economic growth. This case study is applied to three extended regions, namely Aceh Jaya, Nagan Raya, and Simeuleu with their main region namely Aceh Barat. Comparison is analyzed by applying average differential test or t-test equal mean period 2011-2019. Statistically, economic development performance difference of Aceh Barat Regency and it's extended regencies is insignificant. From social development performance, Aceh Jaya Regency is significantly already better than it's main regency in poverty alleviation. Nagan Raya Regency is significantly already better than it's main regency in enhancement of society health quality. The result of this research can be used to evaluate how regional expansion has been working and to decide any kind of policy related to regional expansion

Keyword: *regional expansion, economic development performance, social development performance, t-test*

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah yang merupakan implikasi otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Lincoln, 1999). Dengan pemekaran daerah, daerah pemekaran diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah yang bersangkutan. Adanya independensi pengelolaan daerah otonomi baru (DOB), diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas dalam pemberdayaan potensi ekonomi. Pada akhirnya, memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada daerah tersebut.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi

daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pro dan kontra terkait pemekaran daerah.

Simangunsong (2010) dalam Yulianti (2011) mengatakan bahwa sejatinya pemekaran daerah mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah demokratisasi, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kemudahan membangun dan memelihara sarana dan prasarana, tumbuhnya lapangan kerja baru, dan adanya motivasi pengembangan inovasi dan kreativitas daerah.

Ada lima dampak negatif dari pemekaran daerah (Simangunsong, 2010 dalam Yulianti, 2011). *Pertama*, pemekaran wilayah hanya untuk kepentingan segelintir “elit” atau kelompok masyarakat yang menginginkan jabatan tertentu, misalnya

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Bupati/Walikota, DPRD, Kepala Dinas. *Kedua*, munculnya primodialisme putra daerah. *Ketiga*, biaya demokrasi meningkat tajam. *Keempat*, beberapa hasil pemekaran daerah tidak berdampak positif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, pemekaran daerah dapat berpotensi mematikan daerah induk di beberapa tempat.

Dampak di atas ternyata berhubungan dengan studi evaluasi dampak pemekaran daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2007. Hasil studi memberikan informasi bahwa daerah pemekaran baru ternyata tidak berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVI tahun 2012 yang menyatakan bahwa sejak reformasi, terdapat sebanyak 78,7 persen daerah hasil pemekaran yang gagal mencapai tujuannya dan hanya 21,3 persen daerah hasil pemekaran yang berhasil. Kegagalan tersebut dikarenakan daerah belum memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan daerah dan wilayah sekitarnya.

Pemekaran daerah yang terjadi pada daerah tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi memang banyak terjadi sejak kebijakan desentralisasi ditetapkan pada tahun 1999. Dilihat dari jumlah daerah otonomi, sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 terdapat tujuh provinsi, 26 kota dan 115 kabupaten. Sementara sejak tahun 2005-2014 terdapat tambahan satu

provinsi, delapan kota dan 34 provinsi. Dilihat dari presentasinya berarti jumlah kabupaten/kota bertambah sebesar 34 persen.

Dari banyaknya usulan pemekaran daerah yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, banyak diantaranya diusulkan oleh Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 13 kabupaten/ kota melakukan pemekaran dari awal 10 daerah induk. Adapun 13 kabupaten/kota hasil pemekaran antara lain Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam. Pada saat ini, di wilayah Aceh telah muncul upaya untuk membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Aceh Tenggara dan Gayo Lues (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS). Selain itu, Pemerintah Aceh pernah mengeluarkan surat rekomendasi terkait pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Aceh Raya dari Kabupaten Induk Aceh Besar.

Kabupaten Aceh Barat memiliki kabupaten pemekaran terbanyak di Provinsi Aceh. Hingga saat ini, tercatat sebanyak tiga kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat, yakni Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue. Bahkan, di wilayah Aceh Barat pernah muncul upaya untuk membentuk kota pemekaran baru yakni Kota Meulaboh.

Sebagaimana filosofi pemekaran daerah, kebijakan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang bersangkutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pemerintahan (Todaro dan Smith, 2004). Dengan demikian,

diperlukan analisis perbandingan kinerja pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk dan tiga kabupaten pemekarnya. Dengan demikian diperoleh informasi apakah dalam pelaksanaannya, kabupaten pemekaran dari Aceh Barat berhasil dalam mengoptimalkan potensinya atau justru sebaliknya telah bermuara pada ketertinggalan/perlambatan pertumbuhan daerah yang ditinjau dari kinerja pembangunan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kondisi kinerja pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk dan kabupaten pemekarnya (Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue) pasca pemekaran daerah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sederhana bagi pemerintah daerah setempat dalam memutuskan kebijakan untuk pemekaran daerah selanjutnya sehingga rencana pemekaran wilayah yang akan datang bukan sekedar coba-coba.

Penelitian terkait perbandingan kinerja pembangunan sosial dan ekonomi daerah induk dengan daerah pemekarnya sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2017) menunjukkan bahwa Kinerja ekonomi pada Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau pemekaran secara statistik lebih baik dibandingkan kabupaten induknya, sedangkan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak masih belum lebih baik. Ditinjau dari kinerja sosial, hanya Kabupaten Maybrat yang sudah lebih baik dibandingkan dengan kabupaten induk, sedangkan ketiga kabupaten lainnya

masih belum lebih baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khairullah dan Cahyadin (2006), Yulianti (2011), Ferawati (2015), dan Nizar, dkk (2018) secara umum diperoleh informasi bahwa kinerja pembangunan sosial dan ekonomi daerah induk masih lebih baik dibandingkan daerah pemekaran.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan rata-rata kinerja pembangunan sosial dan ekonomi antara Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemekarnya.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* kinerja pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Aceh Barat sebagai Kabupaten Induk dan tiga kabupaten pemekarnya, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue tahun 2011-2019. Kinerja pembangunan sosial diukur dengan angka harapan hidup (AHH), rata-rata lama sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk miskin (MISKIN). Kemudian, kinerja pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan ekonomi (PE). Pemilihan indikator tersebut berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Nizar, dkk (2018), Siagian (2017), Ferawati (2015), Yulianti (2011), serta Khairullah dan Cahyadin (2006). Penentuan periode tahun 2011-2019 mempertimbangkan ketersediaan data pada instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata (uji-t) untuk melihat perbedaan kinerja pembangunan sosial dan ekonomi

masing-masing kabupaten pemekaran dengan kabupaten induk. Kemudian, hasil uji akan didukung dengan analisis deskriptif yang menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada masing-masing kabupaten. Uji beda dua rata-rata merupakan pengujian terhadap nilai parameter μ_1 (rata-rata populasi pertama) dengan nilai parameter μ_2 (rata-rata populasi kedua) dengan varian kedua populasi diketahui maupun tidak diketahui (Walpole, 2009). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa secara statistik terdapat perbedaan nilai ukuran kinerja pembangunan sosial dan ekonomi yang signifikan dari dua populasi (masing-masing kabupaten pemekaran terhadap kabupaten induk).

Tahapan pengujian pada uji beda dua rata-rata yakni penentuan formulasi hipotesis, penentuan taraf nyata (*level of significance*), penentuan wilayah kritis atau kriteria pengujian, penghitungan nilai uji statistik, dan penarikan keputusan serta kesimpulan. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \mu_{i,j} = \mu_{i,ABAR}$ (tidak ada perbedaan rata-rata kinerja pembangunan sosial dan ekonomi i antara kabupaten pemekaran j dengan kabupaten induk (Aceh Barat))

$H_1 : \mu_{i,j} \neq \mu_{i,ABAR}$ (ada perbedaan rata-rata kinerja pembangunan sosial dan ekonomi i antara kabupaten pemekaran j dengan kabupaten induk (Aceh Barat))

Secara matematis, uji beda dua rata-rata (uji-t) dirumuskan sebagai berikut:

$$t = \frac{(\bar{x}_{i,j} - \bar{x}_{i,ABAR}) - (\mu_{i,j} - \mu_{i,ABAR})}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_{i,j}} + \frac{s_p^2}{n_{i,ABAR}}}}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_{i,j})s_{i,j}^2 + (n_{i,ABAR})s_{i,ABAR}^2}{n_{i,j} + n_{i,ABAR} - 2}$$

Keterangan:

$\bar{x}_{i,j}$: rata-rata indikator i kabupaten j tahun 2011-2019

$\bar{x}_{i,ABAR}$: rata-rata indikator i Kabupaten Aceh Barat tahun 2011-2019

$\mu_{i,j}$: rata-rata populasi indikator i kabupaten j

$\mu_{i,ABAR}$: rata-rata populasi indikator i Kabupaten Aceh Barat

s_p^2 : varians dari nilai indikator i kabupaten j dan Kabupaten Aceh Barat

$n_{i,j}$: jumlah sampel indikator i kabupaten j

$n_{i,ABAR}$: jumlah sampel indikator i Kabupaten Aceh Barat

$s_{i,j}^2$: varians indikator i kabupaten j tahun 2011-2019

$s_{i,ABAR}^2$: varians indikator i Kabupaten Aceh Barat tahun 2011-2019

i : kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (Aceh Jaya (AJAY), Nagan Raya (NAGAN), Simeuleu (SIMEULUE))

Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan nilai kinerja pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya dan kabupaten pemekarannya dibutuhkan nilai *effect size*. Dalam penelitian ini, penghitungan nilai *effect size* digunakan rumus sebagai berikut:

$$effect\ size\ r = \sqrt{\frac{t^2}{t^2 + df}}$$

dimana t adalah t-statistik dan df adalah *degree of freedom*

Kriteria nilai *effect size* menurut Rosenthal (1987) dalam Latan (2014) adalah sebagai berikut:

effect size $0,25 \geq r > 0,50$: kecil

effect size $0,50 \geq r > 0,75$: menengah

effect size $r \geq 0,75$: besar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Beda Rata-Rata Kinerja Pembangunan Sosial dan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019

Menurut Gravetter & Wallnau (2014), sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan

pengujian asumsi terhadap data, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Pada penelitian ini, uji *Jarque-Berra* digunakan untuk pengujian asumsi normalitas data. Kemudian, uji Levene digunakan untuk pengujian asumsi homogenitas data.

Hasil pengujian asumsi normalitas dengan uji *Jarque Berra*, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* untuk keseluruhan data lebih besar dari *alpha* 0,05. Adapun hasil pengujian normalitas dengan bantuan *software evIEWS 9* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Kenormalan dengan Uji *Jarque Berra*

Variabel	<i>P-Value</i>			
	<i>AJAY</i>	<i>NAGAN</i>	<i>SIMEULUE</i>	<i>ABAR</i>
<i>PE</i>	0,41	0,42	0,65	0,41
<i>Miskin</i>	0,77	0,76	0,49	0,66
<i>AHH</i>	0,71	0,69	0,65	0,72
<i>RLS</i>	0,87	0,69	0,55	0,61
<i>IPM</i>	0,98	0,73	0,70	0,63

Hasil pengujian asumsi homogenitas dengan uji *Levene*, varians dari dua kelompok data yang dibandingkan, yakni variabel kinerja pembangunan sosial maupun ekonomi dari kabupaten induk (Aceh Barat) dan

kabupaten pemekaran sama. Dengan demikian, asumsi kesamaan varians (homogenitas) data terpenuhi. Adapun hasil pengujian asumsi homogenitas dengan bantuan *software SPSS 22* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Kesamaan Varians dengan Uji *Levene*

Variabel	<i>P-Value</i>		
	<i>AJAY</i>	<i>NAGAN</i>	<i>SIMEULUE</i>
	vs <i>ABAR</i>	vs <i>ABAR</i>	vs <i>ABAR</i>
<i>PE</i>	0,06	0,08	0,06
<i>Miskin</i>	0,91	0,68	0,06
<i>AHH</i>	0,92	0,28	0,08
<i>RLS</i>	0,09	0,07	0,06
<i>IPM</i>	0,14	0,66	0,67

Dikarenakan asumsi kenormalan dan kesamaan varians sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji beda rata-rata kinerja pembangunan sosial dan ekonomi Kabupaten Aceh

Barat dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019. Adapun hasil pengujian beda rata-rata sampel independen (uji-t) dengan bantuan *software SPSS 22* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Beda Rata-Rata Sampel Independen

Variabel	<i>t-statistic/ P-Value</i>		
	<i>AJAY</i>	<i>NAGAN</i>	<i>SIMEULUE</i>
	vs <i>ABAR</i>	vs <i>ABAR</i>	vs <i>ABAR</i>
<i>PE</i>	-0,96 (0,35)	-0,83 (0,42)	-0,44 (0,66)
<i>Miskin</i>	-5,68 (0,00)*	-1,23 (0,24)	-1,31 (0,21)
<i>AHH</i>	-7,31 (0,00)*	8,01 (0,00)*	-18,54 (0,00)*
<i>RLS</i>	-2,04 (0,06)	-1,77 (0,10)	1,61 (0,13)
<i>IPM</i>	-1,36 (0,19)	-2,42 (0,03)*	-6,61 (0,00)*

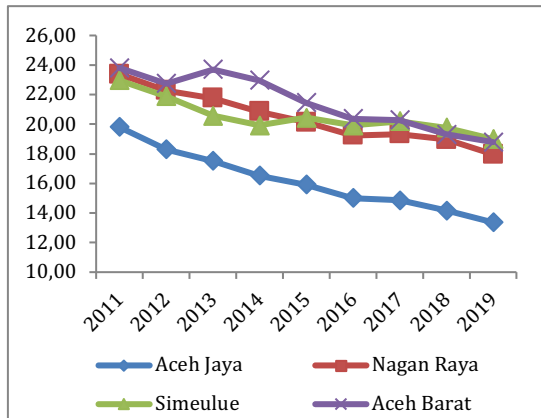
Setelah pengujian beda rata-rata, dilakukan penghitungan nilai *effect size* untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kinerja Kabupaten Aceh Barat

dengan kabupaten pemekarannya. Adapun hasil penghitungan nilai *effect size* sebagai berikut:

Tabel 4 Nilai *Effect Size*

Variabel	<i>P-Value</i>		
	<i>AJAY</i>	<i>NAGAN</i>	<i>SIMEULUE</i>
	vs <i>ABAR</i>	vs <i>ABAR</i>	vs <i>ABAR</i>
<i>PE</i>	-	-	-
<i>Miskin</i>	0,82	-	-
<i>AHH</i>	0,88	0,89	0,98
<i>RLS</i>	-	-	-
<i>IPM</i>	-	0,52	0,86

Analisis Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019



Gambar 1 Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019 (persen)

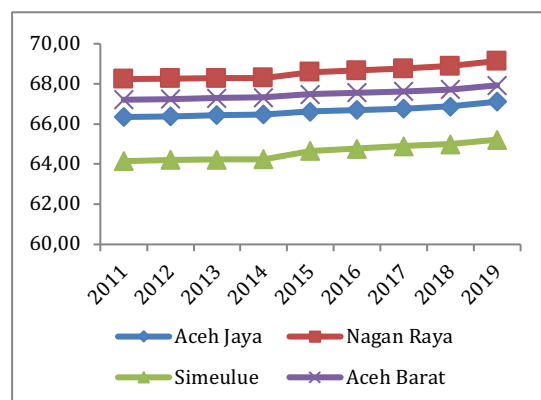
Secara umum, perkembangan angka kemiskinan yang digambarkan dengan persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemekarannya cenderung mengalami trend menurun selama tahun 2011-2019. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah keempat kabupaten tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dari hasil uji beda rata-rata persentase penduduk miskin, perbedaan yang signifikan terjadi pada Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* kurang dari alpha 0,05. Nilai negatif *t-statistic* dari uji beda rata-rata persentase penduduk miskin antara Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2011 hingga 2019. Rata-rata persentase penduduk miskin

Kabupaten Aceh Barat mencapai 21,50 persen sedangkan Kabupaten Aceh Jaya mencapai 16,16 persen pada tahun 2011-2019. Ini berarti kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya mengurangi persentase penduduk miskin lebih baik dibandingkan kabupaten induknya (Kabupaten Aceh Barat). Perbedaan rata-rata persentase penduduk miskin kedua kabupaten ini tergolong besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai *effect size* sebesar 0,82 (lebih besar dari 0,75).

Kedua kabupaten pemekaran lainnya, yakni Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue juga memiliki rata-rata persentase penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Aceh Barat, dimana masing-masing 20,43 persen dan 20,52 persen. Namun, perbedaan rata-rata persentase kedua kabupaten pemekaran ini dibandingkan kabupaten induk tidak signifikan secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* lebih besar dari alpha 0,05

Analisis Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019



Gambar 2 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)

Kabupaten Aceh Barat dan
Kabupaten Pemekarannya
Tahun 2011-2019 (tahun)

Secara umum, perkembangan kualitas kesehatan penduduk yang digambarkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemekarannya cenderung mengalami kenaikan selama tahun 2011-2019. Hal ini menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemekarannya terus menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Dari hasil uji beda rata-rata, diperoleh informasi bahwa rata-rata Angka harapan Hidup (AHH) Kabupaten Aceh Barat dengan kabupaten pemekarannya berbeda secara signifikan selama tahun 2011-2019. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* kurang dari alpha 0,05.

Nilai negatif *t-statistic* dari uji beda rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) antara Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue selama tahun 2011 hingga 2019. Rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat mencapai 67,49 tahun sedangkan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue masing-masing mencapai 66,64 tahun dan 64,60 tahun pada tahun 2011-2019. Ini berarti kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Barat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk lebih baik dibandingkan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten

Aceh Barat mencapai 67,93 tahun. Ini berarti bayi yang dilahirkan penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 dapat bertahan hidup hingga umur 67 tahun.

Perbedaan rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemekarannya tergolong besar. Hal ini dibuktikan dengan nilai *effect size* lebih besar dari 0,75.

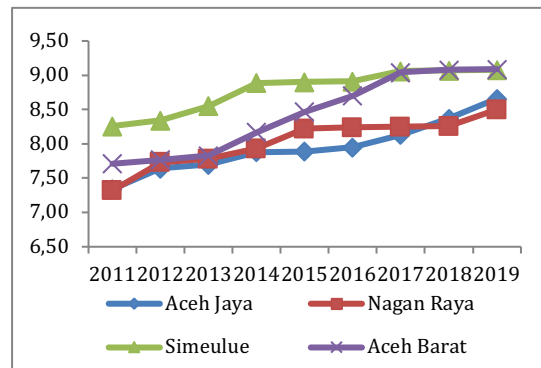
Menurut Siagian (2017), salah satu penyebab rendahnya Angka Harapan Hidup pada kabupaten pemekarannya dibandingkan dengan kabupaten induk adalah pendidikan ibu masih belum cukup mengenai gizi bayi sejak dalam kandungan dan gizi yang diperlukan untuk bayi tersebut masih kurang. Hal ini mengakibatkan Angka Harapan Hidup sulit untuk meningkat secara drastis.

Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan yang jauh lebih banyak di Kabupaten Aceh Barat apabila dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue juga menjadi penyebab rendahnya Angka Harapan Hidup pada Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil pendataan potensi desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tercatat 4 desa di Kabupaten Aceh Barat memiliki Rumah Sakit. Desa yang memiliki Rumah Sakit di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue masing – masing hanya 1 desa. Hal ini juga didukung oleh data dari Dinas Kesehatan Aceh dimana tercatat sebanyak 3 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit khusus di Kabupaten Aceh Barat sedangkan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue hanya memiliki 1 rumah sakit umum.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki nilai *t-statistic* positif. Ini berarti rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Aceh Barat selama tahun 2011 hingga 2019. Rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya mencapai 68,57 tahun pada tahun 2011-2019. Ini berarti kinerja pembangunan sosial Kabupaten Nagan Raya dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk lebih baik dibandingkan Kabupaten Induk (Aceh Barat). Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Nagan Raya mencapai 69,14 tahun. Ini berarti bayi yang dilahirkan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 dapat bertahan hidup hingga umur 69 tahun.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir dengan penanganan dokter di Kabupaten Nagan Raya sebesar 43,80 persen dan lebih besar dibandingkan di Kabupaten Aceh Barat yang hanya 21,19 persen. Kemudian, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir dengan dukun di Kabupaten Nagan Raya sebesar 1,72 persen dan lebih kecil dibandingkan di Kabupaten Aceh Barat yang hanya 3,51 persen

Analisis Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemejarannya Tahun 2011-2019



Gambar 3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pemejarannya Tahun 2011-2019 (tahun)

Secara umum, perkembangan kualitas pendidikan penduduk yang digambarkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemejarannya cenderung mengalami trend menaik selama tahun 2011-2019. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah keempat kabupaten tersebut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari sisi pendidikan.

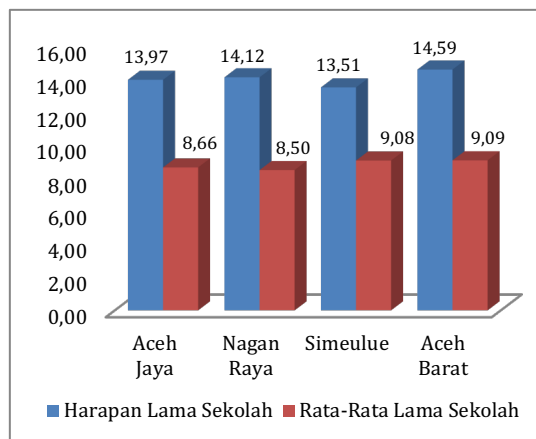
Secara rata-rata, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011-2019 sebesar 8,43 tahun. Angka ini lebih besar apabila dibandingkan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya dimana masing-masing mencapai 7,95 tahun dan 8,03 tahun. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Barat sebesar 9,09 tahun. Ini berarti penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang berusia 25 tahun keatas pada tahun 2018 telah menempuh pendidikan hingga 9 tahun atau lulus SMP. Dengan demikian, program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Aceh Barat berhasil dicapai.

Berbeda dengan Kabupaten Simeulue, rata-rata lama sekolah pada

tahun 2011-2019 secara rata-rata mencapai 8,78 tahun. Angka ini lebih besar apabila dibandingkan Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk.

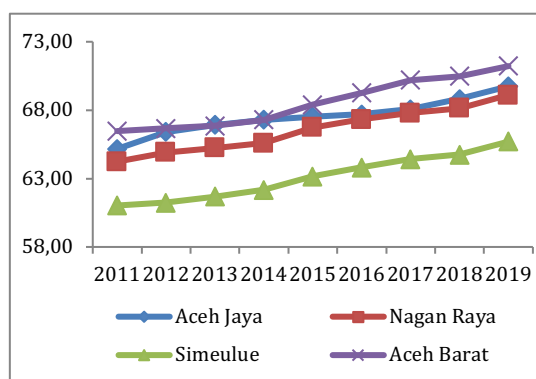
Walaupun demikian, hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa perbedaan angka rata-rata lama sekolah antara Kabupaten Aceh Barat dengan kabupaten pemekarannya tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* lebih besar dari alpha 0,05.

Ditinjau dari angka harapan lama sekolah, baik kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran memiliki angka harapan lama sekolah yang sangat tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di tiap kabupaten seharusnya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan realita yang terjadi saat ini. Perbedaan yang sangat jauh antara angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah baik di kabupaten pemekaran maupun di kabupaten induk disebabkan oleh faktor yang sama, yaitu minimnya tenaga pendidikan, keterbatasan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, dan lain-lain, serta infrastruktur berupa akses transportasi dan jalan yang belum memadai dari pemukiman penduduk khususnya yang masih tinggal di daerah pelosok (Siagian, 2017).



Gambar 4 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2019 (tahun)

Analisis Perbandingan Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019



Gambar 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019 (poin)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan dapat dilihat

bahwa hasil capaian IPM keempat kabupaten setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif dan bervariasi selama tahun 2011 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada keempat kabupaten tersebut semakin baik. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan yang pesat, sementara beberapa daerah lainnya masih relatif lambat.

Dari hasil uji beda rata-rata, diperoleh informasi bahwa ada dua kabupaten pemekaran yang memiliki perbedaan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan dengan kabupaten induk (Kabupaten Aceh Barat) selama tahun 2011-2019. Kedua Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* kurang dari *alpha* 0,05.

Nilai negatif *t-statistic* dari uji beda rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue selama tahun 2011 hingga 2019. Rata-rata Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Barat mencapai 68,54 sedangkan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue masing-masing mencapai 66,56 dan 63,11 pada tahun 2011-2019. Ini berarti kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Barat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih baik dibandingkan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia

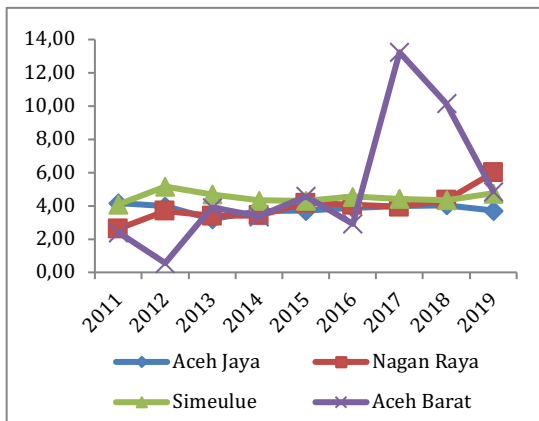
(IPM) Kabupaten Aceh Barat tergolong tinggi yang mana mencapai 71,22.

Berdasarkan nilai *effect size*, perbedaan rata-rata IPM Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya masuk kategori menengah. Kemudian, perbedaan rata-rata IPM Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Simeulue tergolong tinggi.

Rata-rata IPM Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2011 hingga 2019 masih dibawah Kabupaten Aceh Barat yakni sebesar 67,52. Secara statistik, perbedaan rata-rata IPM Kabupaten Aceh Jaya dengan Kabupaten Aceh Barat tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* lebih besar dari *alpha* 0,05.

Pencapaian komponen-komponen penyusun IPM cenderung menunjukkan bahwa komponen yang capaiannya masih cukup rendah, yaitu kabupaten hasil pemekaran. Namun, kabupaten pemekaran mempunyai peluang untuk lebih cepat berkembang atau meningkat dalam capaian yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah memiliki komponen yang sudah tinggi, yaitu kabupaten induk. Namun, masih diperlukan waktu yang cukup lama agar capaian pembangunan manusia yang tinggi secara keseluruhan, yaitu mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dapat tercapai.

Analisis Perbandingan Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019



Gambar 6 Laju Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019 (persen)

Secara umum, selama tahun 2011 hingga 2019 pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten pemekarannya memiliki nilai positif. Ini berarti perekonomian pada empat kabupaten tersebut terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Selama tahun 2011 hingga 2019, laju pertumbuhan PDRB empat kabupaten tersebut berfluktuatif. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menunjukkan bahwa perekonomian di daerah yang bersangkutan menjadi kurang baik namun perekonomian di daerah tersebut tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011-2019 sebesar 5,11 persen. Angka ini lebih besar apabila dibandingkan kabupaten pemekarannya, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya sebesar 3,82 persen, Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,96 persen, dan Kabupaten Simeulue sebesar 4,52 persen.

Walaupun demikian, hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa perbedaan angka pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Aceh Barat dengan kabupaten pemekarannya tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *P-value* lebih besar dari alpha 0,05.

Pemicu fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten ini dapat ditinjau dari struktur perekonomiannya yang terdapat pada rincian PDRB menurut lapangan usaha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian sebagian masyarakat kabupaten induk dan kabupaten pemekaran tidak bergeser selama periode 2011-2019. Keempat kabupaten bertumpu pada sektor pertanian. Penurunan kontribusi pertanian disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk bertani hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka saja tanpa memperhitungkan keuntungan yang diperoleh apabila hasil pertanian juga dimanfaatkan untuk sumber penghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pembangunan ekonomi yang dihitung melalui rata-rata pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk secara statistik tidak signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja kabupaten pemekarannya.
2. Kinerja pembangunan sosial yang dihitung melalui angka kemiskinan (persentase penduduk miskin), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) tidak semuanya secara signifikan lebih baik Kabupaten induk apabila dibandingkan dengan kinerja kabupaten pemekaran.

- a. Kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Jaya dalam mengurangi angka kemiskinan (persentase penduduk miskin) secara statistik signifikan lebih baik dibandingkan Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Barat dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) secara statistik signifikan lebih baik dibandingkan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue namun secara signifikan tidak lebih baik dibandingkan Kabupaten Simeulue.
- c. Kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara statistik tidak signifikan dibandingkan kabupaten pemekarannya.
- d. Kinerja pembangunan sosial Kabupaten Aceh Barat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara statistik signifikan lebih baik dibandingkan kabupaten pemekarannya, khususnya apabila dibandingkan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeuleu.

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait kabupaten pemekaran sehingga dapat dilihat aspek mana yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pembangunan pasca pemekaran daerah
2. Untuk aspek ekonomi, pemerintah daerah sebaiknya memberikan perhatian lebih bagi sektor-sektor utama kabupaten pemekaran. Seperti lebih mendorong masyarakat untuk mulai menjadikan komoditi hasil pertanian sebagai sumber pendapatan dan mulai mengolahnya menjadi barang yang memiliki nilai tambah yang tinggi.
3. Untuk angka kemiskinan, hal yang menjadi fokus utama adalah peningkatan pendapatan per kapita masing-masing penduduk. Hal ini dapat dimulai dengan pengadaan teknologi yang berkenaan dengan potensi terbesar di kabupaten pemekaran agar dapat digunakan oleh penduduk setempat, seperti alat pembajak lahan dan alat penangkap ikan.
4. Untuk angka harapan hidup, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesehatan ibu dan bayi baik itu dari segi pemberian ASI, gizi baik untuk ibu, dan lain-lain. Hal ini dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan sosialisasi dan bantuan langsung berupa materiil untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ibu dan bayi.
5. Untuk bidang pendidikan, perlu adanya pembangunan yang lebih

6. serius terkait infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, pengadaan peralatan sekolah, adanya tenaga kerja yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan pengadaan bahan ajar yang benar. Sederhananya, pemerintah dapat mulai membangun gedung sekolah di tiap distrik pada masing-masing kabupaten pemekaran dan mengoptimalkan pengadaan buku/bacaan yang mengandung konten yang benar.
7. Untuk IPM, diperlukan adanya kesinambungan pembangunan diantara variabel ekonomi, angka kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah agar IPM penduduk kabupaten pemekaran dapat meningkat. Dalam aspek ini, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru di tiap kabupaten pemekaran dengan menyesuaikan terhadap sektor-sektor ekonomi utama di kabupaten tersebut atau memberikan kursus/pelatihan khusus bagi penduduk usia kerja agar dapat menghasilkan barang/jasa yang bernilai tambah tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPFE.
- Bappenas dan UNDP. (2007). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Building and Reinventing*
- Yuliati, Emie. (2011). *Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kabupaten*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Decentralized Governance Project*. Jakarta: Bappenas..
- Ferawati. (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Ekonomi Daerah Pemekaran dengan Daerah Induk di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Gravetter, J. & Larry B. Wallnau. (2014). *Pengantar Statistika Sosial, Edisi 8*. Jakarta: Salemba.
- Khairullah dan Cahyadin, Malik. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11*, No 3.
- Latan, Hengky. (2014). *Aplikasi Analisis Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains dengan IMB SPSS*. Alfabeta: Bandung.
- Nizar, Muhammad, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol. 5*, No. 2
- Siagian, Laura Marisa. (2017). *Perbandingan Kinerja Ekonomi-Sosial Empat Kabupaten Pemekaran versus Kabupaten Induk di Papua Barat*. Jakarta: STIS.
- Smith, Stephen C. & Michael P. Todaro. (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Walpole, R.E. (2009). *Pengantar Statistika Edisi Ke-3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.